

Diplomasi Air Indonesia: Pelbagai Aspek dan Tujuan Negara

Gita Karisma¹, Iwan Sulisty², Indra Jaya Wiranata³

¹²³ Department of International Relations, Universitas Lampung, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Date received: 14 September 2024 Revision date: 15 Oktober 2024 Date published: 01 November 2024</p> <p>Keywords <i>water crisis;</i> <i>hydro-diplomacy;</i> <i>water diplomacy;</i> <i>Indonesia</i></p> <p>Correspondence Email: gita.karisma@fisip.unila.ac.id</p>	<p>Water diplomacy is needed to cooperate and find solutions to water issues. Water diplomacy can be political especially when it involves transnational waters and can even trigger conflicts between countries. Indonesia does not yet have transnational water and interstate water conflicts but remains actively involved in various world water forums. This research uses a qualitative approach with descriptive-analytical research to see Indonesia's water diplomacy. Access to clean water due to its vast territory has caused problems for Indonesia. This issue is one that Indonesia fights for in its water diplomacy. In addition, this research found that Indonesia's water diplomacy focuses on multilateralism. Indonesia is only at the starting point, but several aid projects for clean water and access have been obtained. Indonesia's water diplomacy involves political, integrative, and cooperative aspects. Politically, Indonesia is involved in various regional cooperation frameworks and has a partnership with the Mekong River Commission (MRC) even though Indonesia is not a Mekong River crossing country. Multilateral forums are also used to build cooperation and even fulfill integrative aspects such as efforts to create a Global Water Fund. In addition, Indonesia has shown leadership in engaging in several water policy issues while pushing its interests.</p>

PENDAHULUAN

Masalah air semakin penting saat ini seiring dengan penambahan penduduk, perubahan iklim, dan pencemaran lingkungan yang telah mengakibatkan naiknya kebutuhan akan air sekaligus kelangkaan air. Berdasarkan data World Bank ada lebih dari 2,3 miliar orang yang tidak mampu mendapatkan air minum yang steril dan 3,6 miliar orang tidak memiliki sanitasi yang baik, bahkan krisis air global saat ini telah mengancam pembangunan (World Bank, 2023). Proyeksi penurunan curah hujan sebesar 1-4 persen pada tahun 2020 hingga 2034 diperkirakan akan memicu kekeringan dan konflik alokasi air (Bappenas, 2024). Bahkan menurut Bappenas (2024) Indonesia akan mengalami water stress atau kelangkaan air pada 2050 dan beberapa wilayah Indonesia saat ini mengalami krisis air bersih. Indonesia mempunyai potensi besar untuk sumber daya air terbarukan, namun pasokan dan kebutuhan air sering kali tidak seimbang. Air tawar melimpah di wilayah berpenduduk sedikit di Sumatra, Kalimantan, dan Papua, namun cukup langka di daerah pulau Jawa yang memiliki hanya 10 persen sumber daya air di negara ini (Center for Indonesian Policy Studies, 2022).

Negara cenderung memilih untuk bekerjasama dalam mengatasi masalah air. Mc Cracken mengungkapkan bahwa kecendrungan kerjasama dalam krisis air jauh lebih besar ketimbang konflik yang muncul (McCracken, 2024). Kerja sama lintas batas terkait isu air ini diawali dari dorongan

untuk pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi masalah bersama, memiliki sejarah panjang dan kesuksesan atasnya (Carius and Wolf, 2002).

Tarik menarik dalam kerjasama air di level internasional telah melibatkan upaya diplomasi air dari tiap negara. Diplomasi air merupakan proses politik termasuk negosiasi, konsultasi, dan pembangunan kepercayaan untuk mencegah, mengurangi, dan menyelesaikan perselisihan terkait sumber daya air yang melintasi batas-batas negara dengan tujuan mencapai manfaat bersama dan kerja sama yang lebih luas (Sehring et al., 2022). Jika merujuk pada konsep Sehring ini, maka kasus Indonesia cukup menarik. Ini disebabkan meski Indonesia tidak memiliki perselisihan atau konflik air dengan negara tetangga namun Indonesia tetap aktif terlibat dalam diplomasi air. Hal ini terlihat dari aktifnya Indonesia dalam pelbagai forum internasional.

Indonesia semakin terlibat dalam diplomasi terkait air, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss menyampaikan bahwa “Sebagai negara kepulauan, Indonesia berada di garda depan krisis air global” (Bappenas, 2024). Pada tahun 2024 ini, Indonesia telah terpilih menjadi tuan rumah ke-10 untuk menyelenggarakan World Water Forum pada 18-25 Mei 2024. Forum ini bertema “Water for Shared Prosperity” atau “Air untuk Kemakmuran Bersama” dengan penyelenggaraannya yang terdiri dari tiga tahapan proses, yakni Thematic Process, Regional Process, dan Political Process akan memberi peluang dan menunjukkan motif serta goals Indonesia. Forum ini mengangkat tema “Water for Shared Prosperity” atau “Air untuk Kemakmuran Bersama” dan berlangsung pada tanggal 18-25 Mei 2024 dengan penyelenggaraannya yang terdiri dari tiga tahapan proses, yakni Thematic Process, Regional Process, dan Political Process (Wibawana, 2024).

Indonesia sebagai negara yang tidak memiliki sumber air transnasional dan juga belum mengalami kelangkaan air yang serius nyatanya ikut aktif dalam diplomasi air dunia. Oleh karena itu, artikel ini melihat sejauh mana negara Indonesia terlibat dalam diplomasi air dan apa sesungguhnya yang menjadi fokus dan memotivasi Indonesia dalam diplomasi air. Penelitian terkait keamanan air di Indonesia utamanya masih terbatas pada level daerah. Beberapa penelitian fokus pada adanya masalah keamanan air di beberapa daerah Indonesia (Mustofa, Brahmantika and Tarigan, 2021; Penney, Yantha and Swatuk, 2022; Kepel et al., 2023; Laplaza, no date; Nurdianyoto et al., no date). Penelitian ini umumnya membahas risiko, tantangan, dan peluang dalam isu keamanan air. Diantaranya ada yang juga membahas mengenai peran pemerintah daerah mengatasi masalah krisis air (Laplaza, t.t.; Mustofa dkk).

Selain fokus pada pemerintah daerah, penelitian terkait keamanan air lainnya ialah terkait kerjasama luar negeri. Penelitian ini misalnya membahas mengenai kerjasama air antara Indonesia dengan Belanda. Poin penting kerjasama ini menghasilkan program NCICD, yang merupakan program terintegrasi untuk mengantisipasi beragam masalah seperti penurunan muka tanah, banjir, keterbatasan sumber air dan kekeringan, reklamasi dan revitalisasi dikawasan pantai. Hasil lainnya adalah adanya kerjasama untuk pembangunan Bendungan di Ciawi dan Sukamahi pada 2017 dan pertukaran informasi atau upaya peningkatan keterampilan teknis tentang strategi pengoperasian dan pemeliharaan saluran air (Elfandari, 2018). Temuan masalah dalam artikel ini terutama berkaitan dengan persoalan pembebasan lahan yang telah menjadi penghambat dalam kerjasama pembangunan bendungan (Elfandari, 2018). Penelitian yang secara khusus melihat pola diplomasi air Indonesia termasuk tujuan, fokus dan tantangannya masih terbatas. Oleh karena itu penelitian ini akan fokus pada diplomasi air yang selama ini dibangun oleh Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Fokus penelitian adalah Diplomasi air dengan lokasi penelitian yaitu negara Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka dengan menggunakan sumber-sumber kredibel berupa buku, jurnal ilmiah, dan website-website resmi pemerintah dan organisasi terkait. Beberapa sumber data primer diperoleh dari the United Nations, Bappenas Indonesia, serta pernyataan resmi pemerintah Indonesia dalam pelbagai situs seperti Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Diplomasi Air: Pengantar Konsep

Diplomasi air kian berkembang bersamaan dengan kekhawatiran geopolitik global akan dominasi pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, kerangka kerja, proses negosiasi diplomasi air diusulkan, yang beroperasi secara bersamaan di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal, menawarkan parameter negosiasi dan dukungan keuangan (Spring, 2007). Diplomasi air dapat dipahami sebagai penggunaan air sebagai sarana untuk tujuan utama mencegah atau menyelesaikan konflik (yang muncul) secara damai dan memfasilitasi kerja sama serta meningkatkan saling menguntungkan antar pihak yang berbeda entitas politik (Global High-Level Panel on Water and Peace, 2017). Oleh karenanya manfaat utama yang dapat diperoleh melalui kerja sama bidang air, yaitu atas kemampuannya yang dapat menciptakan ruang politik untuk mengatasi isu-isu yang lebih kontroversial dan memberikan pintu masuk bagi proses pembangunan perdamaian yang lebih luas (Global High-Level Panel on Water and Peace, 2017).

Saat ini diplomasi air semakin berkembang bahkan beragam organisasi internasional seperti the European Union (EU)² and the Organization for Security Cooperation in Europe (OSCE)³ mengadopsi pelbagai term dalam pekerjaan proyek air mereka baik terkait konflik, manajemen, maupun kerjasamanya. Demikian pula, pemerintah nasional menggunakan istilah 'diplomasi air' ketika mengacu pada isu-isu yang terkait dengan kelangkaan air, konflik air, atau kerja sama air (atau ketiadaan kerja sama air).

Diplomasi air sering disebut dalam terminologi *hydro-diplomacy* dan juga *water diplomacy*. Konsep Water diplomacy dapat didefinisikan sebagai “as the use of diplomatic instruments to existing or emerging disagreements and conflicts over shared water resources with the aim to solve or mitigate those for the sake of cooperation, regional stability, and peace” (Schmeier, 2018).

Menurut Schmeier diplomasi air harus dibedakan dari Water Management dan Water Cooperation (Schmeier, 2018). Beberapa contoh aktifitas water management misalnya adalah memantau parameter hidrologi atau lingkungan tertentu sebagai dasar untuk menerapkan pengukuran kualitas air (seperti pengolahan air limbah yang lebih baik di sepanjang sungai bersama) untuk meningkatkan hasil kualitas air di seluruh yurisdiksi hukum seperti yang diterapkan di sepanjang Sungai Rhine sejak beberapa dekade. Sedangkan Kerjasama air (*Water Cooperation*) adalah aktifitas yang semisal berkaitan dengan pengelolaan bendungan yang terintegrasi dan kooperatif di sungai lintas batas dapat memberikan manfaat pembangkit listrik tenaga air atau pengendalian banjir yang lebih besar seperti yang terlihat dalam rincian Perjanjian Sungai Kolombia antara Amerika Serikat dan Kanada. Scheimer menjelaskan lebih lanjut bahwa *water diplomacy* setidaknya berkaitan dengan beberapa hal di bawah ini (Schmeier, 2018):

1. Diplomasi perairan adalah tentang penerapan instrumen diplomasi, bukan instrumen teknis. Instrumen diplomasi air dapat mencakup negosiasi, mekanisme penyelesaian sengketa, pembentukan platform konsultasi, dan pengorganisasian misi pencarian fakta bersama. Instrumen teknis—seperti penetapan rencana pengelolaan wilayah sungai atau jaringan pemantauan bersama—bukan merupakan bagian dari diplomasi air. Meskipun instrumen diplomasi dan teknis sering kali saling melengkapi dan dapat dihubungkan secara langsung, definisi diplomasi perairan secara konsisten memerlukan pembedaan yang ketat seperti yang akan dijelaskan nanti.
2. Diplomasi air berfokus pada perselisihan dan konflik. Ketidaksepakatan dan konflik tidak didefinisikan secara sempit sebagai perselisihan resmi yang diselesaikan dengan diplomasi, atau bahkan kekerasan. Sebaliknya konflik mencakup situasi di mana kelompok pengguna (nasional atau internasional) bersaing dalam memanfaatkan sumber daya yang langka yang dapat menyebabkan perselisihan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat, negara atau wilayah. Konflik dapat berkaitan dengan pemahaman yang berbeda mengenai apakah suatu aliran air harus dikembangkan untuk keuntungan ekonomi sepihak atau untuk keuntungan bersama; sebuah isu yang khususnya berkaitan dengan daerah aliran sungai bersama, misalnya. Idealnya, perbedaan pendapat tersebut diselesaikan sebelum menjadi konflik, sehingga diplomasi air lebih berperan sebagai diplomasi preventif.
3. Diplomasi air memiliki tujuan akhir untuk memastikan kerja sama regional, stabilitas, dan perdamaian. Hal ini lebih dari sekedar pengelolaan sumber daya air. Diplomasi air menggunakan sumber daya air sebagai sarana untuk berkontribusi terhadap tujuan perdamaian dan stabilitas yang lebih luas melalui keterlibatan dan kerja sama diplomatik.

Jika mendasarkan pada teori, maka diplomasi air sangat erat kaitannya dengan pencegahan konflik (Schmeier, 2018). Selanjutnya, tujuan diplomasi air dapat juga dikaitkan dengan bagaimana perkembangan studi keamanan lingkungan. Studi keamanan lingkungan pertama kali dilakukan pada tahun 1970-an, dengan fokus tentang munculnya risiko lingkungan terhadap keamanan negara. Studi keamanan lingkungan generasi kedua berfokus pada apakah ada kelangkaan sumber daya dapat memicu konflik. Generasi ketiga telah berfokus pada ekspansi yang signifikan dan pemahaman kompleks tentang keamanan air (Martinovsky, Petr, 2011).

Mengingat fakta-fakta ini, negara mana pun menerapkan kebijakan keamanan lingkungan berdasarkan banyak alasan. Pertama-tama, suatu negara dapat mengejar tujuan tersebut kebijakan keamanan lingkungan hidup untuk kepentingan nasional melalui ekologi ancaman terhadap keamanan (Rwabizambaga, Alexis, 2007). Alasan ini didasarkan pada motif untuk melindungi lingkungan. Kedua, suatu negara mungkin perlu memenuhi permintaan tersebut kelompok kepentingan domestik yang kuat yang telah menginternasionalkan domestik norma dan aturan (Swatuk, Larry A, 2004). Hal ini bertujuan untuk menenangkan kelompok kepentingan politik tujuan. Ketiga, suatu negara mungkin perlu menyesuaikan norma dan nilai-nilai hijau yang dimilikinya terhadap peraturan, norma, dan nilai-nilai lingkungan hidup internasional (Swatuk, Larry A, 2004). Selain itu, ada beberapa aspek yang dapat membantu menjelaskan tujuan diplomasi air yaitu sebagai berikut:

Tabel 1

Sumber: (Keskinen, Salminen and Haapala, 2021)

<i>Water diplomacy aspects</i>	<i>Examples of related key approaches, frameworks and mechanisms</i>
<i>POLITICAL: Inherently political process that goes far beyond water per se; part of wider diplomatic setting and geopolitics</i>	<i>The most strongly political track: critical hydropolitics; geopolitics; foreign policy; regional cooperation</i>
<i>PREVENTIVE: Peace mediation and conflict prevention</i>	<i>Preventive diplomacy; peace mediation and peace building; conflict resolution</i>
<i>INTEGRATIVE: Connecting multiple forms and levels of institutions and stakeholders and the different types of knowledge</i>	<i>Multi-track Diplomacy; Integrative Diplomacy; Integrated Water Resources Management; knowledge co-production</i>
<i>COOPERATIVE: Cooperation and good governance to promote reasonable and equitable water use</i>	<i>Cooperative arrangements; benefitsharing approaches; international agreements on shared waters; sustainability</i>
<i>TECHNICAL: providing an information basis for the diplomacy about water, related resources and the environment</i>	<i>The most strongly technical track: Information on hydrology, water quantity, quality and timing; knowledge production and products such as hydrological models and impact assessments.</i>

Para pembuat kebijakan atau pemerintah seharusnya dapat mengambil upaya lebih untuk mewujudkan keuntungan dalam diplomasi air. Ini membutuhkan peran diplomat untuk menemani dan memfasilitasi upaya teknis dan development expert di wilayah basin (cekungan air). Secara khusus, pembuat kebijakan harus melakukan beberapa hal terutama yaitu (Pohl et al., 2014):

1. Mengerahkan kepemimpinan politik dalam mendorong kerja sama dan integrasi antar wilayah sungai
2. Menghubungkan dan memperkuat struktur kelembagaan yang tepat untuk keterlibatan yang terkoordinasi dan lintas sektoral dan komprehensif
3. Memperkuat jalur diplomasi kerja sama lintas batas di bidang air dengan berinvestasi lebih banyak dalam pelatihan dan peningkatan kapasitas, memperluas upaya untuk membangun kepercayaan pada wilayah sungai bersama, dan meningkatkan mekanisme respons krisis dan penyelesaian konflik terkait air.

Beberapa masalah yang menjadi tantangan dalam kerjasama air misalnya terkait pengelolaan wilayah sungai lintas batas yang sering kali tertutupi oleh politik antar wilayah sungai, yang pada gilirannya sering diperburuk oleh asimetri kekuasaan. Dalam konteks ini, fokus pada solusi teknis untuk wilayah sungai bersama seringkali tidak cukup; hal ini perlu dilengkapi dengan keterlibatan politik. Para pembuat kebijakan luar negeri dapat memberikan dukungan penting dalam hal ini, meskipun keterlibatan mereka juga mengandung risiko yang juga dapat memasukkan (yang dianggap) agenda-agenda luar (Pohl et al., 2014).

Permasalahan Air di Indonesia

Diplomasi air telah menjadi bagian yang semakin penting dari hubungan internasional dan kebijakan domestik, seiring dengan meningkatnya kelangkaan air, polusi, dan ketidaksetaraan akses terhadap air bersih di seluruh dunia. Di Indonesia, sebuah kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan populasi yang melebihi 270 juta jiwa, masalah air memiliki tantangan dan peluang yang unik dan kompleks. Dengan jaringan sungai, danau, dan perairan pesisir yang luas, serta curah hujan tahunan yang tinggi, air merupakan sumber daya penting bagi pertanian, industri, dan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Namun, urbanisasi yang cepat, deforestasi, dan dampak perubahan iklim memberikan tekanan besar pada sumber daya air di negara ini, sehingga membutuhkan diplomasi air yang efektif baik di dalam negeri maupun secara global.

Penelitian ini mengeksplorasi pendekatan Indonesia terhadap diplomasi air, dengan mempertimbangkan strategi pengelolaan air domestiknya serta peran negara ini dalam mendorong kerja sama regional dan internasional mengenai sumber daya air lintas batas. Pembahasan ini mencakup analisis tantangan air domestik di Indonesia, dan kebijakan air utama. Indonesia menghadapi beberapa tantangan terkait air yang signifikan dan memerlukan perhatian mendesak. Tantangan ini mencakup kelangkaan air di beberapa wilayah, distribusi sumber daya air yang tidak merata, kualitas air yang buruk, banjir, dan konflik terkait air. Masalah-masalah ini diperburuk oleh perubahan iklim, deforestasi, pertumbuhan populasi, dan industrialisasi. Sebagaimana Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perubahan iklim telah menyebabkan penurunan produktivitas pertanian dan kelangkaan air (Kementerian Sekretariat Negara, 2024).

Meskipun Indonesia memiliki kelimpahan air secara keseluruhan, distribusinya tidak merata, yang menyebabkan kekurangan air di beberapa wilayah, terutama selama musim kemarau. Pulau Jawa dan Bali, yang merupakan tempat tinggal lebih dari 60% populasi negara ini, menghadapi kekurangan air yang akut akibat tingginya kepadatan penduduk dan permintaan air untuk pertanian serta industri. Di sisi lain, banyak wilayah di Sumatra, Kalimantan, dan Papua memiliki kelebihan sumber daya air tetapi kekurangan infrastruktur untuk penyimpanan dan distribusi air (Shofiani, 2019).

Kelangkaan air di Indonesia terutama berkaitan dengan ketidakseimbangan populasi, serta kekeringan akibat cuaca ektrim dan perubahan iklim. Pada tahun 2018, kekeringan melanda 250.000 hektar lahan pertanian di Indonesia. Selanjutnya kekeringan juga mengakibatkan gagal panen pada tahun 2019 yang mencakup 17.000 hektar sawah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat ketergantungan air pada sektor pertanian di Indonesia juga cukup tinggi terutama di wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali dan NTB. Infrastruktur yang mendukung untuk masalah ketersediaan air ini juga belum memadai. Sebagaimana jumlah bendungan yang ada Indonesia hanya 280 dan jauh tertinggal jauh dibanding jumlah bendungan yang dimiliki negara lain seperti Tiongkok yang sudah memiliki 11.000 bendungan, India yang memiliki 1.500 bendungan, Korea dengan 4.000 bendungan, Jepang 3.000 bendungan, dan Amerika Serikat 5.000 bendungan (Martyasari, 2022).

Pelbagai permasalahan air nyatanya juga diperburuk oleh kekeringan yang kerap terjadi di Indonesia setiap tahunnya akibat perubahan iklim ataupun cuaca ektrim. Contohnya, Fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) telah menyebabkan kekeringan dan munculnya beberapa titik api pada musim kemarau di Indonesia. Pada tahun 2019, ketika El Niño bertepatan dengan IOD telah menyebabkan munculnya lebih dari 4000 titik api (IFRC, 2023). Selama tahun 2020-2034, curah hujan tahunan menurun 1-4% dibanding periode 1995-2010 di Indonesia (Kementerian Sekretariat Negara, 2024). Bukti Penurunan curah hujan yang signifikan ini telah mengancam sumber daya air

Indonesia yang nyata diakibatkan oleh menipisnya sumber daya hutan dan perubahan iklim global (Pawitan, 2018).

Selain kelangkaan air dan kekeringan, polusi badan air juga merupakan masalah besar di Indonesia. Limbah industri, air limbah yang tidak diolah, dan limpasan pertanian berkontribusi terhadap pencemaran sungai dan danau, membuat sumber air tidak aman untuk dikonsumsi dan merusak ekosistem perairan. Menurut Bank Dunia (2020), lebih dari 75% air sungai di Indonesia sangat tercemar, dengan penyakit yang ditularkan melalui air menimbulkan risiko kesehatan masyarakat yang signifikan. Dampak buruk lain dari limbah yang membuat air tercemar, selain kesehatan, yaitu bencana. Banjir merupakan masalah tahunan di Indonesia, terutama selama musim hujan. Jakarta, ibu kota, sangat rentan, mengalami banjir parah hampir setiap tahun akibat kombinasi curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang buruk, dan penurunan permukaan tanah. Perubahan iklim diperkirakan akan memperburuk situasi ini, dengan kenaikan permukaan air laut yang mengancam komunitas pesisir dan infrastruktur.

Konflik atas sumber daya air juga sangat mungkin terjadi ketika masyarakat dihadapkan pada kepentingan khusus, terutama di tingkat lokal, telah terjadi di beberapa bagian Indonesia. Konflik ini sering muncul karena persaingan air antara pengguna pertanian, industri, dan domestik, serta perselisihan atas pembangunan bendungan dan infrastruktur air. Sebagai contoh, pembangunan Bendungan Jatigede di Jawa Barat memicu protes dari komunitas lokal yang tergusur akibat proyek tersebut (Ardiansyah, 2021).

Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (Peraturan Pemerintah No. 121/2015) memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Kebijakan ini menekankan perlunya pengelolaan sumber daya air terpadu (Integrated Water Resources Management/IWRM), yang mempromosikan pengembangan dan pengelolaan air, lahan, dan sumber daya terkait secara terkoordinasi untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan sosial tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem vital (Bappenas, 2015). Selain aturan tersebut, Indonesia telah mendirikan 133 organisasi pengelolaan daerah aliran sungai (river basin organizations/RBOs) untuk mengelola sistem sungainya, yang diklasifikasikan menjadi 17 wilayah sungai berdasarkan batas hidrologis. Peran RBO ini adalah untuk mengawasi alokasi air, pembangunan infrastruktur, dan penegakan standar kualitas air. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan (Surya et al., 2020). Undang-Undang Sumber Daya Air Indonesia (UU No. 17/2019) juga mengatur penggunaan sumber daya air, memastikan bahwa air digunakan untuk kepentingan masyarakat terbesar sekaligus melindungi ekosistem air. Undang-undang ini melarang privatisasi sumber daya air, mengakui air sebagai barang publik yang harus dikelola oleh negara untuk kepentingan umum. Selain itu, undang-undang ini memberikan pedoman untuk pemberian izin penggunaan air, menekankan pentingnya akses yang adil terhadap air untuk semua sektor (Suwarno, 2019).

Diplomasi Air Indonesia dalam Kerjasama Multilateral

Secara umum, diplomasi air Indonesia banyak dilakukan secara multilateral. Misalnya baru baru ini, Indonesia menjadi tuan rumah melalui penyelenggaraan Forum Air Sedunia atau World Water Forum (WWF) ke-10 yang diselenggarakan di Bali pada 18-24 Mei 2024. World Water Forum merupakan forum air global yang diadakan setiap tiga tahun sekali. Forum ini ada dan diselenggarakan oleh World Water Council yang dilakukan setiap 3 tahun sekali dimulai sejak tahun 1997 (World Water Forum, 2024). Forum ini telah digelar sebanyak sembilan kali, dan pada

pertemuan ke-10 akan dilaksanakan di Bali, Indonesia pada 18 hingga 25 Mei 2024. Indonesia mengusung tema yakni "Water for Shared Prosperity" sedangkan tema air dunia tahun ini adalah water for peace. Deklarasi Menteri yang akan menjadi dokumen hasil WWF ke-10 mencerminkan beberapa kepentingan nasional Indonesia, yang tercermin dari beberapa fokus penting Indonesia yaitu Hari Danau Sedunia, pembentukan Center of Excellence ketahanan air dan iklim, serta pengarusutamaan pengelolaan sumber daya air terpadu di bidang perikanan pulau-pulau kecil (Kemlu, 2024).

World Water Forum ke-10 fokus membahas empat hal, yakni konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation), ketahanan pangan dan energi (food and energy security), serta mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters). Adapun hasil dari Sebanyak 244 sesi dalam forum tersebut diharapkan dapat memberikan hasil konkret mengenai pengarusutamaan pengelolaan air terpadu untuk pulau-pulau kecil atau Integrated Water Resources Management (IWRM) on Small Islands, pembentukan pusat keunggulan atau praktik terbaik untuk ketahanan air dan iklim atau Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE), serta penetapan Hari Danau Sedunia (Kemenparekraf RI, 2024).

Dalam forum World Water beberapa peran Indonesia yang penting diantaranya pertama adalah, saat Indonesia memimpin proses politik penyusunan naskah deklarasi tingkat menteri yang diusulkan untuk WWF Ke-10, yang telah disepakati dan akan disahkan dalam forum pertemuan ini. Pada awalnya dalam proses penyusunan naskah deklarasi itu terdapat perbedaan pandangan mendasar mengenai tata kelola air yang terjadi antara negara-negara yang mengendalikan hulu sungai dengan negara hilir. Hal tersebut terkait dengan tata kelola sungai yang melintasi beberapa negara. Naskah pada akhirnya dapat disempurnakan setelah tiga kali pertemuan antarnegara yang dilaksanakan di markas UNESCO di Paris yang dipimpin oleh Indonesia. Indonesia juga kerap melakukan konsultasi dengan pelbagai negara terutama yang terlibat konflik dan organisasi untuk mencari solusi perbedaan dan mencapai mufakat terkait isi deklarasi tersebut.

Isi naskah deklarasi ini terutama berkaitan dengan komitmen untuk menghindari peperangan karena air (*weaponisation of water*). Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Tri Tharyat, meski komitmen penolakan eksploitasi air dalam perang tersebut hanya terdiri atas satu paragraf dari keseluruhan isi naskah deklarasi, Indonesia memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk menjamin bagian tersebut dapat diterima semua negara (antaranews.com, 2024).

Deklarasi tingkat menteri tersebut juga mencakup empat usulan tindak lanjut usai gelaran WWF Ke-10 di Bali, yaitu pembentukan centre of excellence untuk ketahanan air dan iklim, penetapan Hari Danau Sedunia, pengarusutamaan isu pengelolaan air untuk negara-negara berkembang di pulau-pulau kecil, serta pembentukan Compendium of Concrete Deliverables and Actions. Selain dalam WWF, Indonesia juga telah terlibat dalam pelbagai forum multilateral terkait isu air. Keterlibatan tersebut setidaknya mencakup beberapa organisasi penting di bawah ini:

Tabel 1. Keterlibatan Indonesia dalam Diplomasi Air

Sumber: diolah oleh penulis

<i>Platform</i>	Bentuk Kerja Sama
World Water Council	World Water Forum

ASEAN	ASEAN Strategic Plan of Action on Water Resources Management (ASPA-WRM) dan ASEAN Working Group on Water Resources Management
UN Water	Menangani keterkaitan antara perubahan iklim dan keamanan air dalam Conference of the Parties/COP
Global Water Partnerships	Indonesia Water Partnerships (IWP)
Mekong River Commission	Disaster Risk Reduction, Water Resource Management, Climate Change Adaptation and Sustainable development

Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara yang tergabung dalam UNESCO Intergovernmental Hydrological Programme (IHP) yang merupakan kerjasama yang berada dalam lingkup United Nations untuk melakukan pengelolaan air, edukasi dan pengembangan dalam menghadapi permasalahan air global dengan membantu pengembangan masyarakat yang mampu bertahan dan mampu menghadapi permasalahan air global (UNESCO, 2024).

Di lingkup regional, Indonesia tergabung dalam ASEAN yang memiliki ASEAN Working Group on Water Resources Management lewat kelompok kerja ini dibuatlah visi air ASEAN atau ASEAN Strategic Plan of Action on Water Resources Management dengan Indonesia sebagai salah satu negara anggota. Visi ini dibuat sebagai jawaban atas tantangan tata kelola air global yang coba diraih pada 2025 (Sabrina, 2023). Lokasi strategis Indonesia di Asia Tenggara menempatkannya di pusat upaya diplomasi air regional. Sumber daya air lintas batas, seperti sungai yang mengalir di beberapa negara, memerlukan pengelolaan terkoordinasi untuk mencegah konflik dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Indonesia telah berperan aktif dalam mendorong kerja sama mengenai isu-isu air di kawasan ini, terutama melalui ASEAN dan kerangka kerja multilateral lainnya.

Melalui ASEAN, Indonesia telah terlibat dalam pelbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama regional dalam pengelolaan sumber daya air. Inisiatif ini termasuk Kelompok Kerja ASEAN untuk Pengelolaan Sumber Daya Air yang mempromosikan pendekatan pengelolaan air terpadu, serta Rencana Strategis Lingkungan ASEAN, yang mencakup fokus pada peningkatan kualitas air dan pengurangan bencana terkait air (Sekretariat ASEAN, 2019). Kepemimpinan Indonesia di ASEAN sangat penting dalam membentuk kebijakan regional terkait air, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan sungai lintas batas.

Selain di tingkat regional, Indonesia juga secara aktif terlibat dalam diplomasi air global melalui partisipasinya dalam organisasi dan perjanjian internasional yang berfokus pada tata kelola air. Keterlibatan Indonesia dalam kerangka kerja ini mencerminkan komitmennya untuk menangani tantangan air global, seperti perubahan iklim, keamanan air, dan akses terhadap air bersih serta sanitasi. Indonesia merupakan pemain kunci dalam inisiatif terkait air dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti platform UN-Water, yang mengoordinasikan upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 6 (SDG 6) tentang air bersih dan sanitasi. Indonesia telah menyelaraskan kebijakan air nasionalnya dengan target SDG 6, terutama terkait dengan peningkatan akses terhadap air minum yang aman, peningkatan efisiensi penggunaan air, dan perlindungan ekosistem air (UN-Water, 2021).

Sebagai negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia telah menjadi pendukung vokal untuk menangani keterkaitan antara perubahan iklim dan keamanan air dalam forum internasional seperti Konferensi Para Pihak (Conference of the Parties/COP) pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Indonesia menyerukan kerja sama internasional yang lebih besar terkait langkah-langkah adaptasi iklim, termasuk investasi dalam infrastruktur air dan pengembangan sistem peringatan dini untuk bencana terkait air. Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam Forum Air Dunia, platform global terbesar untuk diskusi mengenai kebijakan air. Pada Forum Air Dunia ke-9 di Senegal tahun 2022, Indonesia menyoroti upayanya dalam mempromosikan diplomasi air dan menyerukan kemitraan internasional yang lebih kuat untuk menangani tantangan air global. Partisipasi Indonesia dalam forum seperti ini menunjukkan perannya dalam membentuk agenda air global (Global Water Partnership, 2022).

Indonesia juga membuat Indonesia Water Forum yang merupakan sekretariat Indonesia dalam Global Water Partnerships dunia, tujuan kerjasama ini memiliki peran sebagai institusi yang memberikan wadah hubungan bagi para pemangku kepentingan yang asalnya dapat dari pemerintah, sektor swasta, komunitas dan pihak – pihak lain yang setuju dengan perencanaan dan tindakan nyata dalam prinsip integrasi management sumber daya air (inawaterKAI, 2013).

Indonesia juga memiliki kerjasama kemitraan dengan Mekong River Commission (MRC) dan telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait dasar dan awal dari kerjasama antara Indonesia dan MRC (Sochan, 2024). Dalam kerjasama ini beberapa hal yang menjadi topik kerjasama seperti penanganan resiko kerusakan bencana alam, water resource management, perubahan iklim dan pengembangan berkelanjutan. Perjanjian kerjasama ini sendiri secara simbolik ditandatangani oleh Menteri luar negeri Indonesia dan dan perdana Menteri Laos yakni Retno Marsudi dan Saleumxay Kommasith dalam acara perpindahan kekuatan ASEAN di Luang Prabang Laos 2024.

Meskipun Indonesia bukan negara riparian Sungai Mekong, negara ini telah menyatakan dukungan untuk Komisi Sungai Mekong (Mekong River Commission/MRC), yang memfasilitasi kerja sama antara Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam untuk pengembangan berkelanjutan di Cekungan Mekong. Indonesia telah memberikan kontribusi berupa keahlian teknis dan berbagi praktik terbaik mengenai pengelolaan daerah aliran sungai, menawarkan pelajaran yang diperoleh dari pengalamannya sendiri dengan sungai lintas batas seperti Ciliwung dan Kapuas (Mahardika, 2020). Indonesia juga telah merundingkan beberapa perjanjian air lintas batas dengan negara-negara tetangga, terutama terkait dengan sungai yang berbagi dan batas maritim. Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia telah membentuk mekanisme bersama untuk mengelola Sungai Sesayap, yang mengalir antara Kalimantan dan Sabah. Perjanjian ini penting untuk memastikan alokasi air yang adil dan mencegah konflik atas sumber daya bersama (Sari & Wahyudi, 2020).

Dari pelbagai kerjasama multilateral Indonesia telah menerima beberapa manfaat. Misalnya pada 21 Juli 2023 lalu, United States Agency for International Development (USAID) menjadikan Indonesia sebagai negara prioritas Strategi Global Sektor Air dan menginvestasikan lebih dari 50 juta dolar AS untuk meningkatkan akses 1 juta penduduk Indonesia terhadap layanan air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim pada 2027 (Kementerian Sekretariat Negara, 2024). Sebelumnya dalam periode 2006-2018, Indonesia juga telah menerima dana dari Bank Dunia untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). PAMSIMAS telah mencapai 22.961 desa yang tersebar di 376 kabupaten di 33 provinsi. Proyek ini memberikan manfaat bagi sekitar 17,2 juta orang dengan akses ke fasilitas air yang lebih baik

(melebihi target tahun 2018 sebesar 16 juta orang), dan 15,4 juta orang dengan akses ke sanitasi dasar yang lebih baik (World Bank, 2019).

Pelbagai Aspek dan Tujuan dari Diplomasi Air Indonesia

Dampak perubahan iklim diseluruh dunia serta kelangkaan air membuat adanya kekerasan, ketegangan dalam politik dan tata kelola air yang salah menjadi alasan utama penting pengelolaan dan kerjasama air lintas batas (Klimes et al., 2019). Dari permasalahan tersebut konsep *hydro-diplomacy* menjadi konsep yang sangat penting dalam kerjasama internasional. Diplomasi air adalah proses dinamis dan berorientasi politik yang bertujuan untuk mencegah, memitigasi, dan menyelesaikan ketegangan terkait air di perairan bersama dengan memanfaatkan secara simultan alat diplomasi, pengetahuan terkait air, dan mekanisme kerja sama di pelbagai jalur diplomasi (Keskinen et al., 2021). Dalam *hydro-diplomacy* terdapat lima aspek penting yang dapat menjelaskan konteks kerjasama dan tujuan *hydro-diplomacy* yakni politik, integratif, preventif, kooperatif serta teknis. Aspek teknis menjelaskan tentang peran air dalam konteks diplomasi, aspek politik menjelaskan peran politik dalam interaksi tiap pihak dalam diplomasi, lalu tiga aspek sisanya, integratif, kooperatif, dan preventif dan dilihat sebagai motif dan tujuan adanya *hydro-diplomacy* (Keskinen, Salminen and Haapala, 2021).

Air dalam konteks diplomasi Indonesia memiliki aspek teknis, ia dipertukarkan dan dijadikan objek kerjasama misalnya dengan kerjasama dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang di danai oleh Bank Dunia. Dalam beberapa proyek lain yang melibatkan USAID atau dalam world water forum, Indonesia berupaya meningkatkan kerjasama berkenaan dengan layanan air minum, akses air, dan sanitasi. Secara politik, Indonesia menggunakan isu air untuk terlibat dalam pelbagai kerjasama air, termasuk kerjasama dengan Komisi Sungai Mekong (Mekong River Commission/MRC), meski secara geografi Indonesia bukan negara riparian Sungai Mekong. Pemerintah Indonesia bahkan telah memberikan kontribusi berupa keahlian teknis dan berbagai praktik terbaik mengenai pengelolaan daerah aliran sungai dengan MRC ini.

Jika mendasarkan pada teori yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka diplomasi air sangat erat kaitannya dengan pencegahan konflik (Schmeier, 2018). Akan tetapi alasan untuk menyelesaikan konflik ini tidak dapat dijelaskan dalam kasus Indonesia. Indonesia menjadi salah satu contoh dimana negara tidak menggunakan air dalam kerangka konflik akan tetapi menggunakannya sebagai tujuan kooperatif, integrative, dan preventif bukan untuk mencegah konflik namun untuk menyelesaikan masalah akses terhadap air, penyediaan air bersih,antisipasi kekeringan sesuai dengan kondisi permasalahan air di Indonesia. Disamping itu, ada upaya pembangunan kepemimpinan dan join the club di pelbagai forum multilateral.

Aspek kooperatif dan integratif dalam diplomasi air Indonesia sudah disampaikan secara tersurat misalnya oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dasar utama diplomasi air adalah dorongan untuk pengembangan dan kerjasama terkait tata kelola air berkelanjutan dan membuat air sebagai sumber daya yang membawa kemakmuran (Kemlu, 2024b). Menurut Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali “Melalui *hydro-diplomacy*, Indonesia berusaha untuk memfasilitasi dialog antarnegara/antarpemerintah melalui upaya berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengalaman terkait manajemen sumber daya air, serta mendorong kerja sama sinergis dalam upaya penyelesaian konflik terkait air di pelbagai wilayah,” (Kemenparekraf RI, 2024). Harapan kerjasama adalah kunci dari aspek kooperatif mengingat bahwa kerjasama dilakukan untuk memfasilitasi pengembangan dan kerjasama internasional dalam tata kelola air yang berkelanjutan serta mengoptimalkan manfaat dari air sebagai sumber daya penting

yang dapat mendukung kemakmuran ekonomi dan sosial serta mencegah dampak yang lebih buruk akibat adanya situasi yang sulit diprediksi terkait perubahan iklim terhadap ketahanan sumber daya terutama air.

Aspek preventif dalam diplomasi air Indonesia juga sejalan dengan tujuan utama Indonesia yang sering diungkapkan yaitu berkenaan dengan kolaborasi dan dialog untuk sharing iptek dan meningkatkan kerjasama. Ini diperlukan terutama untuk manajemen sumber daya air dan mitigasi bencana terkait air, dan membangun kapasitas pengelolaan air. Terkait dengan water for peace sebagai tema hari air dunia tahun 2024, Indonesia memfasilitasi dialog. Dialog dan kerjasama pada akhirnya diharapkan mampu memfasilitasi perdamaian melalui pemahaman antar negara. Melalui ini urgensi Indonesia dalam konteks ini menjelaskan adanya aspek preventif untuk mencegah adanya konflik dan dampak dari adanya perubahan iklim dan tata kelola air yang buruk, kooperatif untuk melakukan kolaborasi yang menguntungkan dalam membantu pengembangan tata kelola air, integratif untuk integrasi dengan semua pemangku atau pihak dalam penanganan tata kelola air yang kompleks.

Secara teknis, Indonesia sendiri telah melakukan diplomasi dalam beberapa bentuk kerjasama seperti mengajak negara lain untuk melakukan upaya terbaik serta bertukar informasi dalam pengelolaan air, menciptakan kemampuan manajemen air yang mampu bertahan dan berkelanjutan, melakukan investasi dalam pengembangan teknologi tata kelola air, serta menekankan kerjasama bilateral maupun multilateral dalam mencapai tujuan SDGs 6 (Sinaga, 2024). Sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10 pada tahun 2024, Indonesia mengajukan empat usulan terkait tata kelola air (Saputra, 2024). Pertama penetapan hari danau sedunia, mengarahkan arus utama pada kelola air negara berkembang, serta membentuk centre of excellence. Dan diluar empat usulan tersebut Indonesia juga menyarankan adanya pendanaan global terkait tata kelola air (Global Water Fund). Ide mengenai pendanaan tata kelola air dunia serta manajemen air berkelanjutan menjadi contoh dari aspek integrative yang diperjuangkan dalam diplomasi air Indonesia.

Indonesia memang belum memiliki masalah air yang bersinggungan dengan negara lain atau terlibat dalam konflik terkait air, namun jika melihat pembahasan mengenai masalah air di Indonesia yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, Indonesia memiliki masalah air bersih dan ketidakmertaan akses terhadap air. Diplomasi air Indonesia ditujukan untuk kepentingan ini. Indonesia juga tidak ingin kehilangan peran di pelbagai forum air dan disaat yang sama mengambil peluang investasi di bidang air dan mendapatkan keuntungan untuk mengatasi beberapa masalah seperti penyediaan air bersih dan masalah akses air yang tidak merata. Diplomasi Indonesia saat ini misalnya telah membuahkan hasil dengan mendapat banyak bantuan dana dari Bank Dunia untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

Selain kepentingan ini, Indonesia juga ingin menunjukan kepemimpinan diantara negara berkembang dan mempelopori kerjasama air. Peran aktif Indonesia utamanya bisa dilihat dari upaya lobi Indonesia misalnya terkait Pertama kesepakatan dunia, terhadap penetapan Hari Danau Sedunia. Untuk usulan ini, Indonesia telah sudah melakukan lobi di pelbagai kesempatan termasuk di PBB, karena deklarasi Hari Danau Sedunia diharapkan bisa disahkan di semester II 2024 di New York. Kedua, adalah Indonesia bermaksud mensukseskan pengelolaan air secara terintegrasi di pulau pulau kecil. Dan ketiga Penetapan center of excellence terkait ketahanan air dan iklim. Pertemuan di Bali juga dimaksudkan untuk meluncurkan satu compendium dari proyek proyek konkret yang saat ini tengah dikurasi pemerintah Indonesia (Compendium of Concrete Deliverables and Actions).

Hal ini juga dapat dilihat dari bagaimana Indonesia berupaya mendorong pembentukan Dana Air Global (Global Water Fund) untuk merespons ketimpangan anggaran dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) ke-6, yaitu pemenuhan akses air bersih dan sanitasi bagi semua. Masalah pendanaan ini terutama sangat dibutuhkan oleh negara berkembang termasuk negara-negara kepulauan Pasifik, terutama dalam hal pengembangan akses air bersih untuk kebutuhan manusia (*water development*).

Presiden Fiji, Wiliame Katonivere, dalam satu wawancara khusus dengan ANTARA, mengaku bahwa Fiji belum dapat melakukan *water development* sendiri karena keterbatasan kapasitas negara kepulauan Pasifik itu sehingga suatu sistem pendanaan global memang dibutuhkan (antaranews.com, 2024). "Kami tidak bisa mengembangkannya sendiri karena kemampuan kami terbatas, tetapi dengan adanya Dana Global Air dan kami punya keahliannya-- kami punya orang-orang yang berpengalaman di bidang itu--, kami bisa mengatasi masalah air. Tidak hanya di Fiji, tetapi untuk negara pulau-pulau Pasifik lainnya," ujar Katonivere. Nyatanya wacana mengenai dana Air Global dalam Worl Water Forum 10 di Indonesia ini masih pada tahap diskusi pengusulan pendiriannya. Indonesia mengambil kesempatan ini untuk dapat menunjukan kepemimpinan di antara negara negara berkembang dalam memperjuangkan masalah dana untuk *water development* ini.

KESIMPULAN

Dalam menjalankan diplomasi air, Indonesia melibatkan diri dalam pelbagai kerjasama multilateral seperti ASEAN, Global Water Partnership, World Water Council dan lainnya. Indonesia bahkan juga terlibat dalam Mekong River Commision meski Indonesia bukan negara rivarian atau terlibat langsung dalam konflik sungai Mekong. Melalui kerjasama ini, Indonesia telah memberi bantuan keahlian teknis dan berbagi praktik terbaik mengenai pengelolaan daerah aliran sungai dengan negara-negara disekitar sungai Mekong. Jika teori mengatakan bahwa diplomasi air dijalankan untuk penyelesaian konflik, maka Indonesia lebih banyak menggunakan diplomasi air untuk membangun kepemimpinan dan meningkatkan hubungan kerjasama serta dialog dengan pelbagai negara dan secara bersamaan membangun kerjasama air terutama untuk mengatasi masalah air bersih dan pemerataan akses air di Indonesia. Air digunakan secara teknis untuk mendapatkan bantuan misalnya dari USAID dan Bank Dunia. Peran air dalam diplomasi air pada aspek politis dapat dilihat misalnya ketika Indonesia menjalin kerjasama terkait air dan mendekati negara di sungai Mekong. Aspek kooperatif jelas disebut oleh pelbagai representative pemerintah Indonesia dipelbagai forum sebagai bentuk preventif krisis air sekaligus membangun aspek integratif dalam kerjasama air. Selain itu, yang terpenting Indonesia juga menunjukan kepemimpinan dengan memperjuangkan isu air di level global misalnya terkait program hari Danau dunia dan Dana air Global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexis Rwabizambuga, "Environmental Security and Development, Conflict, Security&Development, 7(1), 2007, p. 205.
- Antaranews.com (2024) Melihat lebih dekat 'hydro-diplomacy' RI di Forum Air Dunia Ke-10, Antara News. Available at: <https://www.antaranews.com/berita/4112592/melihat-lebih-dekat-hydro-diplomacy-ri-di-forum-air-dunia-ke-10> (Accessed: 2 September 2024).
- Ardiansyah, M. (2021). Local community protests against the Jatigede Dam: A case of water-related conflict in West Java. *Journal of Indonesian Social and Environmental Issues*, 10(2), 45-67.

- ASEAN Secretariat. (2019). ASEAN Cooperation on Water Resources Management. ASEAN.
- Bappenas (2024) Indonesia Highlights Water Crisis, Blue Economy, and South-South and Triangular Cooperation at World Economic Forum |. Available at: <https://www.bappenas.go.id/berita/indonesia-paparkan-krisis-air-ekonomi-biru-hingga-ksst-di-world-economic-forum-4lQt6> (Accessed: 17 February 2024).
- Bappenas (2015) National Policy on Water Resources Management. Government of Indonesia.
- BBC. (2024). “Politik air” jadi penentu penting di abad 21. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-40938109>
- Carius, A. and Wolf, A. (2002) Water, Conflict, and Cooperation. The United Nations and Environmental Security.
- Center for Indonesian Policy Studies (2022) Water Scarcity Threatens our Food: From Competition to Unequal Access, CIPS | Think Tank. Available at: <https://www.cips-indonesia.org/post/water-scarcity-threatens-our-food-from-competition-to-unequal-access> (Accessed: 16 February 2024).
- Elfandari, A.R. (2018) ‘Kerjasama Indonesia-Belanda di Bidang tata Kelola Air dan Lingkungan Hidup Tahun 2012-2017 (Studi Kasus Penanggulangan Banjir di Kota Jakarta)’.
- Global Water Partnership. (2022). Indonesia’s engagement in the World Water Forum. Global Water Partnership Bulletin, 5(1), 12-15.
- Global High-Level Panel on Water and Peace (2017) Hydro-Diplomacy for Water, Peace, and Security Beyond Shared Water Management. Think-Tank Roundtable Report. Geneva: Geneva Water Hub.
- IFRC (2023) Indonesia: Drought Response 2023.
- inawaterKAI (2013) ‘Story about IWP’, Kemitraan Air Indonesia (KAI), 16 December. Available at: <https://inawater.org/story-about-iwp/> (Accessed: 7 September 2024).
- Kemenparekraf RI (2024) Siaran Pers World Water Forum 2024: ‘Hydro-Diplomacy’ Indonesia di World Water Forum ke-10. Available at: <https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-forum-air-sedunia-2024-hydro-diplomacy-indonesia-di-world-water-forum-ke-10> (Accessed: 19 August 2024).
- Kementerian Sekretariat Negara (2024) Perkuat Diplomasi dan Ketahanan Air: Indonesia Menjadi Tuan Rumah 10th World Water Forum 2024 | Sekretariat Negara. Available at: https://www.setneg.go.id/baca/index/perkuat_diplomasi_dan_ketahanan_air_indonesia_menjadi_tuan_rumah_10th_world_water_forum_2024 (Accessed: 9 April 2025).
- Kemlu (2024) Hydro Diplomacy The Right Solution To Global Water Problems | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Available at: <https://kemlu.go.id/portal/en/read/5887/berita/hydro-diplomacy-the-right-solution-to-global-water-problems> (Accessed: 19 August 2024).
- Kemlu. (2024b). Hydro Diplomacy Solusi Jitu Atasi Masalah Air Global | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/>
- Kepel, T.L. et al. (2023) ‘Water Security In Tunda Island, Banten Indonesia: Potency & Threat’, Journal of Marine and Island Cultures, 12(1). Available at: <https://doi.org/10.21463/jmic.2023.12.1.01>.
- Keskinen, M., Salminen, E. and Haapala, J. (2021) ‘Water diplomacy paths – An approach to recognise water diplomacy actions in shared waters’, Journal of Hydrology, 602, p. 126737. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126737>.

- Klimes, M., Michel, D., Yaari, E., & Restiani, P. (2019). Water diplomacy: The intersect of science, policy and practice. *Journal of Hydrology*, 575, 1362–1370. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.02.049>
- Laplaza, A. (no date) ‘Sociotechnical Adaptive Water Governance: A Case Study of Water Governance in Lombok Indonesia’.
- Larry A. Swatuk, “Environmental Security in Practice”, 31 of the Pan-European Conference on International Relations, The Hague, 9-11 September 2004, p. 1.
- Martiyasari (2022) Akademisi: Pengelolaan Air Perlu Kolaborasi Pelbagai Pihak, CNBC Indonesia. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221206172850-4-394333/akademisi-pengelolaan-air-perlu-kolaborasi-pelbagai-pihak> (Accessed: 19 February 2024).
- McCracken, M. (2024) Scarcity and Water Cooperation. *The Geographer*.
- Mustofa, M.U., Brahmantika, S.G.S. and Tarigan, B.R. (2021) ‘Military and Water Governance Practices: A Theoretical Analysis of the Involvement of Indonesian National Armed Forces in the Citarum Harum Project in West Java, Indonesia’, *Journal of Asian Social Science Research*, 3(1), pp. 39–56. Available at: <https://doi.org/10.15575/jassr.v3i1.46>.
- Nurdianyoto, I. et al. (no date) ‘Challenges and Opportunities for Securing Water in Surabaya Metropolitan City, East Java, Indonesia’.
- Pawitan, H. (2018) ‘Climate change impacts on availability and vulnerability of Indonesia water resources’, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 200, p. 012003. Available at: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/200/1/012003>.
- Penney, D., Yantha, M. and Swatuk, L. (2022) ‘A Megacity’s Hydrological Risk: An Analysis of Water Security Issues in Jakarta City, Indonesia’, in L. Swatuk and C. Cash (eds) *The Political Economy of Urban Water Security under Climate Change*. Cham: Springer International Publishing (International Political Economy Series), pp. 81–104. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-08108-8_4.
- Pohl, B. et al. (2014) *The Rise of Hydro-Diplomacy: Strengthening Foreign Policy for Transboundary Waters*. Adelphi. Available at: <https://doi.org/10.13140/2.1.4035.5848>.
- Sari, N., & Wahyudi, D. (2020). Transboundary Water Agreements between Indonesia and Malaysia: Managing Shared Water Resources. *Water International*, 45(3), 278-292.
- Sabrina, A.U.A.D. (2023) ‘Visi Air Asean Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di Indonesia’, *Jurist-Diction*, 6(2), pp. 247–264. Available at: <https://doi.org/10.20473/jd.v6i2.45238>.
- Schmeier, S. (2018) What is water diplomacy and why should you care?, *Global Water Forum*. Available at: <https://www.globalwaterforum.org/2018/08/31/what-is-water-diplomacy-and-why-should-you-care/> (Accessed: 30 April 2024).
- Sehring, J. et al. (2022) ‘Diving into Water Diplomacy – Exploring the Emergence of a Concept’, *Diplomatica*, 4(2), pp. 200–221. Available at: <https://doi.org/10.1163/25891774-bja10082>.
- Shofiani, S. (2019). Addressing Water Scarcity in Java and Bali: Policy Responses and Challenges. *Indonesian Water Journal*, 7(3), 102-115.
- Sochan, R. (2024) Indonesia becomes 1st non-Mekong nation to sign MoU with Mekong River Commission. Available at: <https://asianews.network/indonesia-becomes-1st-non-mekong-nation-to-sign-mou-with-mekong-river-commission/> (Accessed: 6 September 2024).
- Spring, Ú.O. (2007) ‘Hydro-Diplomacy: Opportunities for Learning from an Interregional Process’, in C. Lipchin et al. (eds) *Integrated Water Resources Management and Security in the Middle*

- East. Dordrecht: Springer Netherlands (NATO Science for Peace and Security Series), pp. 163–200. Available at: https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5986-5_7.
- Suwarno, N. (2019). The Indonesian Water Law: Implications for Water Resources Management. *Indonesian Law Review*, 5(2), 43-60.
- Surya, I., et al. (2020). River Basin Management in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Water Policy Review*, 15(2), 34-47.
- UNESCO (2024) Intergovernmental Hydrological Programme | UNESCO. Available at: <https://www.unesco.org/en/ihp> (Accessed: 6 September 2024).
- Wibawana, W.A. (2024) Sejarah World Water Forum, Indonesia Jadi Tuan Rumah Tahun 2024, *detiknews*. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-7313752/sejarah-world-water-forum-indonesia-jadi-tuan-rumah-tahun-2024> (Accessed: 30 April 2024).
- World Bank (2023) Accelerating Change To Solve The Water Crisis, World Bank. Available at: <https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2023/03/22/accelerating-change-to-solve-the-water-crisis> (Accessed: 18 February 2024).
- World Water Forum (2024) Overview | 10th World Water Forum 2024, Registration of The 10th World Water Forum. Available at: <http://worldwaterforum.org/overview> (Accessed: 7 September 2024).

Copyright holder:

Gita Karisma (2024)

First publication right:

[Andalas Journal of International Studies](#)

This article is licensed under:

